

**PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KOTA BITUNG
(Suatu Studi di Kecamatan Madidir Kota Bitung)¹**

Oleh : Rio Hermanto Malumbot²

ABSTRAK

Sebagaimana Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Agar masyarakat sipil dapat membangun opini dan menentukan kebijakan publik maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Atas dasar rumusan tersebut itulah, maka perencanaan yang diusulkan adalah perencanaan dengan pendekatan partisipatif. Ide dasar dari perencanaan partisipasi adalah masyarakat merupakan salah satu sumber daya terbesar yang sangat memahami potensi dan masalah yang ada, lebih dari pemerintah sekalipun. Karena beragamnya aktivitas yang dilakukan, setiap orang memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pemilik sekaligus prosedur dari ide, budaya, nilai dan aktivitas, masyarakat harus memiliki kesempatan dalam menyuarakan posisinya terhadap berbagai perencanaan, kebijakan dan landasan hukum yang akan dan sudah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat yang ada di kota Bitung di kecamatan Madidir, memiliki banyak potensi guna membantu, menunjang dan mendukung program-program pembangunan di kota Bitung. Potensi yang dapat digali dan lebih diberdayakan pada masyarakat di kecamatan Madidir yang berada di wilayah pesisir pantai, sehingga banyak penduduk di kecamatan Madidir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah di implementasikan oleh pemerintah Kecamatan Madidir guna menganggulangi permasalahan kemiskinan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan di bidang pendidikan ini diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program beras untuk masyarakat miskin (Raskin), dimaksudkan untuk membantu keluarga-keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok keluarga. Program keluarga harapan (PKH) dimana program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin melalui persyaratan menyekolahkan anaknya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Penanggulangan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia antara lain adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

yang tepat sehingga menjadi lebih kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas di segala bidang kehidupan, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan fungsi pembanguna akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Pemerintah di negara Indonesia dari tingkat atas sampai yang paling rendah yakni pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa. Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pemerintah mulai pemerintah pusat sampai pada pemerintah kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya keikutsertaan, partisipasi dan pemberdayaan dari segenap lapisan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu dalam masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri.

Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Pendekatan yang dipakai dalam pemberdayaan masyarakat memiliki maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas untuk mampu mempengaruhi perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Pemberdayaan masyarakat mendorong terjadi internalisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal penciptaan lapangan kerja, serta partisipasi penduduk miskin dalam membangun, pembentukan modal sosial dan tata pemerintahan yang baik.

Agar lebih dapat memantapkan dan mensukseskan program-program perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sangat perlu untuk mengikutsertakan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Agar masyarakat sipil dapat membangun opini dan menentukan kebijakan publik maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Atas dasar rumusan tersebut itulah, maka perencanaan yang diusulkan adalah perencanaan dengan pendekatan partisipatif.

Ide dasar dari perencanaan partisipasi adalah masyarakat merupakan salah satu sumber daya terbesar yang sangat memahami potensi dan masalah yang ada, lebih dari pemerintah sekalipun. Karena beragamnya aktivitas yang dilakukan, setiap orang memiliki keunikan dan kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pemilik sekaligus prosedur dari ide, budaya, nilai dan aktivitas, masyarakat harus memiliki kesempatan dalam menyuarakan posisinya terhadap berbagai perencanaan, kebijakan dan landasan hukum yang akan dan sudah ditetapkan.

Pembangunan yang ada khususnya pembangunan di kelurahan, mencakup pembangunan disegala bidang kehidupan. Melalui pembangunan kelurahan diusahakan agar masyarakat

memiliki kualitas dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengatasi segala tantangan maupun hambatan dalam rangka stabilitas.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah kelurahan perlu merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan kelurahan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan dilapangan, masyarakat yang ada di kelurahan belum mempunyai kemauan dan kemampuan untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat yang ada di kota Bitung, contohnya di kecamatan Madidir, memiliki banyak potensi guna membantu, menunjang dan mendukung program-program pembangunan di kota Bitung. Potensi yang dapat digali dan lebih diberdayakan pada masyarakat di kecamatan Madidir yang berada di wilayah pesisir pantai, sehingga banyak penduduk di kecamatan Madidir yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Namun, realitasnya dilapangan pemberdayaan masyarakat di kota Bitung belum bisa dioptimalkan sepenuhnya, khususnya oleh pemerintah kelurahan. Di satu sisi, program-program pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah kota Bitung sudah cukup banyak digulirkan guna mengurangi jumlah kemiskinan, diantaranya melalui program P2KP (program penanggulangan kemiskinan di perkotaan), program dana pendidika BOS (bantuan operasional sekolah), program raskin (beras untuk masyarakat miskin), program pos pelayanan keluarga berencana dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir bagi kelompok-kelompok nelayan. Apalagi telah ada institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberdayakan masyarakat kelurahan yakni lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 32 tahun 2006 tentang lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan kota Bitung, yang mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di kota Bitung.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi program-program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan sebenarnya mengacu pada istilah dalam bahasa inggris, yaitu "*empowerment*" yang merupakan konsep atau gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Oleh sebab itu, wajar konsep ini menunjukkan dua kecenderungan yaitu :

1. Bahwa pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.
2. Bahwa pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dapat dikatakan sebagai jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya atau kekuatan (makalah CAI, 2002:19).

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah “membuat” seseorang berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah manusia. Dalam arti, mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Pemberdayaan mengandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang. Melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu tantangan kehidupan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mulandar dan Thamrin, 1996:97).

Pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996) ialah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.

Kata “berdaya” dalam kamus bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1976:215) diartikan sebagai : (1) berkemampuan; bertenaga, (2) mempunyai akal, cara; dsb, untuk mengatasi sesuatu.

United Nations (1956:83-92), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa/kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom*, jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4. *Stimulating the community to realize that it has problems*

Didalam masyarakat yang terkait terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5. *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6. *Helping people to identify their most pressing problems*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Konsep Kemiskinan

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin, yang diharapkan dengan adanya upaya melalui proses pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat miskin dapat lebih mampu dan berdaya. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki.

Membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan multidimensional (Mukhtar, 2003). Oleh karena itu, banyak terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan.

Mendefinisikan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh dimensi yang kita gunakan. Namun apapun dimensi yang dipakai, pada dasarnya kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis berikut. Pertama, kemiskinan dalam arti absolut. Adalah kondisi riil manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan menggunakan parameter garis kemiskinan, yaitu suatu gagasan atau besaran nilai (diukur dengan uang atau pangan) yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2004:4).

Merujuk pada kriteria kemiskinan yang diajukan oleh United Nations Development Program (UNPD), US \$1 per hari per kepala adalah batasan miskin dan tidak miskin. Artinya jika seseorang berpenghasilan dibawah US \$1 per hari maka dia dapat digolongkan ke dalam kriteria miskin (unpd.org.mdg.basics).

Berbeda dengan kriteria yang disusun UNPD, meskipun sebenarnya pertimbangan yang mendasarinya sama, Badan Pusat Statistik Indonesia memberikan kriteria kemiskinan dengan satuan rumah tangga sebagai basis pengukuran. Kriteria rumah tangga miskin yang dirumuskan BPS adalah sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m²
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air terlindungi/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari;

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;
13. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, perak, kapal motor atau barang modal lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2005:15).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Fokus Penelitian

Dari pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Yang menjadi prinsip utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nantinya kegiatan ini akan menjadi basis program pembangunan daerah, regional dan bahkan program nasional.

Proses pemberdayaan masyarakat yang sekarang ini digulirkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan masyarakat yang akan berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat guna mendukung program-program pembangunan, kesinambungan kegiatan dan program-program tersebut.

Berangkat dari pemahaman sebagaimana yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan pokok sebagai berikut :

- a. Apa sajakah program-program pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan di kota Bitung?
- b. Bagaimana pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung?

Untuk mengukur sejauh mana aspek utama dari pernyataan tersebut, penulis mencoba untuk memilih isu yang mencakup pertanyaan-pertanyaan atas masing-masing diantaranya :

- a. Program pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan di Kecamatan Madidir Kota Bitung.

b. Sikap dan Mental masyarakat

Informan

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Penggunaan *purposive sampling* ini memberi kebebasan peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti peneliti dapat menentukan *sampling* sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan substansi permasalahan. *Sampling* yang dimaksudkan bukanlah *sampling* yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi informasi. Pemilihan sampel tidak berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan sesuai dengan substansi penelitian.

Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap - jenuh (*data saturation*). Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (*point of theoretical saturation*). Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah :

- Camat Madidir,
- Sekretaris Kecamatan,
- 3 orang Seksi,
- 4 Tokoh masyarakat
- 10 masyarakat di Kecamatan Madidir

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *Setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumbernya datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007;62-63).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data yang berifat deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian, kemudian data tersebut dipadukan dan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran, interpretasi atau penafsiran atau fakta-fakta tersebut.

Menurut Nawawi, penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (1994:73).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan di kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa.
- b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.
- c. Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bitung Ada Di Kecamatan Madidir

Dari semua program yang digulirkan oleh pemerintah yang sasarannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Kota Bitung secara langsung dan tidak langsung juga memperkuat kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin yang ada di Kota Bitung terutama di Kecamatan Madidir.

Hal ini tentunya sejalan dengan sejumlah teori ekonomi yang mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan cara peningkatan ketrampilan sumber daya manusianya dan mengembangkan teknologi. Melalui pemberian bantuan atau suntikan dana ini maka diharapkan produktivitas akan meningkat.

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangkaian Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) yang dimulai Juli 2005. Program BOS mempunyai tujuan utama untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, yakni 13-16 tahun yang berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak dapat sekolah atau melanjutkan sekolah.

Dana BOS bukan diterima siswa dalam bentuk uang tunai, tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah, sehingga dengan adanya dana BOS ini, maka siswa dibebaskan dari biaya- biaya sekolah.

Namun tidak semua siswa yang mendapatkan dana BOS ini, dana BOS diutamakan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Untuk standar siswa yang berasal dari keluarga miskin di Pihal Dinas Pendidikan Nasional menetapkan kriteria dari BPS, yang antara lain rumah yang masih darurat atau tidak mempunyai tempat tinggal sama seklai, lantai rumah tanah, mempunyai lebih dari 3 anak yang ketiganya dalam usia sekolah, penghasilan keluarga minim.

Untuk pencairan dana tersebut dilakukan setiap 3 bulan oleh Pemerintah Pusat, dimulai dari bulan Januari – Maret, April – Juni, Juli - September dan Oktober – Desember.

Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pendidikan Nasional telah menyalurkan dana BOS pada tahun 2011 untuk SD/ sederajat menerima Rp. 2.943.352.000 yang diberikan kepada 262

sekolah dasar / sederajat dan untuk SMP / sederajat menerima sebesar Rp. 1.697.022.000 yang diberikan kepada 83 SMP/ sederajat.

Kemudian Pemerintah Kota Bitung dengan adanya Program BOS tersebut juga memberikan insentif dana pendamping dari APBD yang berupa bantuan Operasional Pembebasan Biaya Pendidikan (BOPBP) yang dimulai dari tahun 2006 namun masih juga belum mencukupi.

Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin)

Usaha pemerintah dalam rangka program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, salah satunya adalah beras untuk masyarakat miskin (raskin). Proses penyalurannya dalam 1 tahun anggaran di Kota Bitung untuk tahun 2014 disalurkan sebanyak 10 bulan dengan rata-rata kuantum yang diberikan untuk tiap-tiap kepala keluarga adalah 10-12 Kg.

Beras untuk masyarakat miskin ini dijual kepada masyarakat miskin dengan harga Rp.1000 per Kg. diharapkan adanya program raskin ini masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program Penganggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangkaian Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan bakar minyak. P2KP awal pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2004. P2KP mengacu pada program bank dunia, dimana kriteria kemiskinan disini mempunyai keunikan tersendiri yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Program ini diterapkan dengan harapan dapat tercipta kelembagaan masyarakat yang secara generic disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui penggalan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan antara lain; dapat dipercayai, ikhlas/kerelawaan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan dalam keragaman, demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. BKM yang dikembangkan dan diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam meyuaralam aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan

Dalam rangka percepatan upaya penganggulangan kemiskinan, pemerintah mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan memeriksakan kesehatan serta pemberian makanan bergizi kepada anak-anak usia balita dan ibu hamil/menyusui. Untuk jangka pendek, bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sedangkan untuk jangka waktu panjang melalui peningkatan pendidikan serta perbaikan kondisi kesehatan dan gizi, dapat memutus rantai kemiskinan.

Kemiskinan suatu keluarga sangat terikat dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Pembangunan selama ini yang lebih ditujukan pada sisi supply atau pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan belum memberikan dampak yang efektif terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya masyarakat miskin. Rendahnya tingkat pendidikan sebuah rumah tangga miskin menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Keluarga ini pun tidak mampu menjaga kesehatan ibu mengandung sehingga mengakibatkan tingginya resiko kematian ibu saat melahirkan, dan buruknya kondisi

kesehatan bayi yang dilahirkan. Anak-anak keluarga miskin juga banyak yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena putus harus bekerja membantu mencari nafkah.

Program ini diharapkan akan berdampak pada pola perubahan pola pikir masyarakat miskin untuk memiliki generasi penerus yang lebih berkualitas dan mandiri. Dan juga program ini diharapkan dapat mengurangi kasus pekerja anak. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita serta meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat sekolah dasar. Dan yang menjadi sasaran program ini adalah ibu-ibu pada usia subur, sedang hamil atau menyusui, anak-anak balita, serta anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama, terutama yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin.

Lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah masyarakat miskin terhadap program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah. Peneliti kemudian menanyakan program yang sering mereka dengan, lihat dan bisa didapatkan serta dirasakan manfaatnya langsung. Untuk program bantuan pemerintah yang paling populer menurut informan adalah BPJS dan Raskin dan program-program itu juga yang dianggap paling bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Harapan Masyarakat Miskin Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan

Menjawab sejumlah pertanyaan seputar program-program pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota Bitung sendiri, terlihat para informan telah mengetahui program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kebanyakan dari informan mendengar dan mengetahui program-program penanggulangan kemiskinan tersebut dari adanya pertemuan rutin masyarakat (kumpulan, kolom, dll) dan dari mulut ke mulut.

Mengenai bantuan yang paling membantu bagi masyarakat adalah BPJS. Argumentasi mereka, program BPJS sangat membantu mereka dalam meringankan biaya pengobatan yang mahal, mulai dari bayar dokter sampai menebus resep di apotik.

Untuk program BOS mereka pun mengetahui bahwa di sekolah tempat anaknya belajar tidak lagi membayar uang sekolah/SPP, tetapi untuk uang buku, transport dan uang jajan anaknya masih merupakan pengeluaran yang cukup besar bagi mereka setelah pengeluaran untuk biaya untuk makan sehari-hari. Adapun kendala yang mereka alami untuk dapat mengakses bantuan BOS tersebut karena kurangnya sosialisasi dan perbedaan sekolah negeri dan swasta.

Secara umum para masyarakat berharap adanya beasiswa bagi anak yang benar-benar tidak mampu tetapi berprestasi, dana langsung yang diberikan kepada siswa yang tidak mampu sehingga benar-benar tepat sasaran, pemberian cuma-cuma buku dan perlengkapan sekolah lainnya serta sosialisasi yang lebih baik lagi.

Sedangkan untuk bantuan BPJS biasanya dapat mereka akses karena mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat. Secara umum informan tidak mengalami kendala dalam mengakses program ini.

Para informan juga berharap agar untuk program BPJS agar lebih ditingkatkan kualitas pelayanan, seperti sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga medis yang setingkat dengan dokter, serta untuk lebih diberikan kemudahan dalam prosedur pendaftaran untuk berobat di Rumah sakit.

Bantuan raskin yang diterima oleh masyarakat rata-rata menerima 12 Kg/KK di tiap-tiap Kelurahan, hal ini dirasakan oleh responden sangat membantu dalam menekan biaya belanja makan sehari-hari. Hampir semua responden mengaku tidak menemui kendala untuk dapat mengakses bantuan raskin tersebut.

Untuk program P2KP/PNPM Kota Bitung di Kecamatan Madidir sudah berjalan dengan baik, dengan program P2KP ini, masyarakat sangat menaruh harapan yang cukup besar karena bantuan dari program ini ada;ah dari bank dunia yang pengelolaannya bisa dikatakan cukup professional.

Secara keseluruhan, masyarakat mengaku cukup puas terhadap penyaluran bantuan program penanggulangan kemiskinan yang sedang atau telah berjalan di Kecamatan Madidir.

Secara keseluruhan program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang sedang atau sudah berjalan di Kecamatan Madidir, sudah cukup baik. Namun, masalah utama yang ada ialah masih terbatasnya dana yang dianggarkan untuk mendanai program-program ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah di implementasikan oleh pemerintah Kecamatan Madidir guna menanggulangi permasalahan kemiskinan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan di bidang pendidikan ini diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program beras untuk masyarakat miskin (Raskin), dimaksudkan ntuk membantu keluarga-keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok keluarga. Program keluarga harapan (PKH) dimana program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin melalui persyaratan menyekolahkan anaknya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
2. Program pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan di kota Bitung belum berjalan optimal dikarenakan pemerdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
3. Selain itu juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang bertujuan menampung dan menjabarkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan, yang ada di tiap-tiap Kelurahan di Kecamatan Madidir belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terutama dalam hal memberdayakan masyarakat yang ada di kelurahan.

Saran

Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian dan kesimpulan yan telah dipaparkan diatas, untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan, maka penulis dengan kerendahan hati mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi permasalahan kemiskinan perlu adanya wadah yang berperan sebagai motor da penggerak dalam usaha ini, maka diperlukan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk bisa lebih meningkatkan tugas dan fungsinya, dalam bentuk alokasi anggaran untuk LPM-K, kejelasann struktuktur dan bidang-bidang tugas dari masing-masing kelompok kerja yang ada di lingkungan harus lebih dioptimalkan dan hubungan koordinasi yang baik dengan pemerintah kelurahan dalam melakukan dan pelaksanaan setiap kegiatan.
2. Faktor yang sangat menentukan pemberdayaan masyarakat dapat berhasil adalah meningkatkan sumberdaya manusia agar dapat meningkatkan kapasitas manajemen dan

organisasi dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi bisa juga dalam bentuk yang lebih bervariasi seperti sosialisasi, penyuluhan masyarakat tentang pembangunan, komunikasi pembangunan, pelatihan-pelatihan, rembuk warga, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan ketrampilan dan pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus BKM di tiap kelurahan.

3. Proses sosialisasi dan penyebarluasan pendekatan pemberdayaan masyarakat harus lebih sering dilakukan. Hal ini dikarenakan pendekatan pemberdayaan masih relative baru bagi masyarakat kebanyakan, sehingga sangat diperlukan perubahan sikap, pola pikir dan perilaku dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini bisa dilakukan melalui lokakarya, seminar dan penerapan. Usaha sosialisasi dan penyebarluasan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini sangat membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait, khususnya yang berada di jajaran manajemen, baik pemerintah maupun tim fasilitator.
4. Keterlibatan semua pihak sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya oleh masyarakat itu sendiri, tetapi pemerintah baik eksekutif maupun legislative sudah waktunya sekarang untuk lebih peka dan berpihak pada masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara : *pertama*, dengan duduk bersama antara pakar-pakar ekonomi, sosiolo, legislative dan eksekutif untuk merumuskan tentang definisi kemiskinan, sehingga dengan demikian akan terciptanya kesamaan visi dan misi yang nantinya tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan baik di tingkat pusat sampai di daerah. *Kedua*, mengupayakan dua jenis kemiskinan, yakni kemiskinan moral dan kemiskinan harta ditangani dengan bersama-sama dan sungguh-sungguh, karena jika hanya salah satunya saja maka untuk bisa menekan angka kemiskinan hanya jika hanya salah satunya saja maka untuk bisa menekan angka kemiskinan hanya sebuah angan-angan dan mimpi. Dan terutama, bagi kita masyarakat kita perlu melakukan tiga prinsip. Pertama, penerapan *good governance* di lingkungan tempat kita hidup dan bekerja. Kedua, mengupayakan dan meningkatkan *capacity building*. Dan *Ketiga* , selalu berusaha untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan kita untuk disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2010. Bitung.
- BPS Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002, Jakarta: BPS
- Branch, C. Melville, 1995. Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar dan Penjelasan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Life Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice. Australia: Longman.
- Maleong, Lexy, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2003. Strategi Pemberdayaan Berbasis kelembagaan Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP di Desa Sukadanau.
- Nawawi Hadari, 1999. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: L. Erlangga
- Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). 2005. Available at: <http://dickyrahardi.wordpress.com/2007/02/21/pmerintah-ri-dan-community-development/>.

Poewardarminta W.J.S. 1984. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta. Balai Pustaka Nasional.

Sugiyono, Prof.Dr. 2007, ***Memahami Penelitian Kualitatif***. Alfabeta; Bandung.

Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan- Bacaan untuk Antropologi Perkotaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Susanto, S. Astrid. 1983. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Penerbit Alumni.

Winarso, Haryo Pradono,dkk.2002. Pemikiran dan Praktek Perencanaan Dalam Era Transformasi di Indonesia. Bandung: Penerbit Departemen Teknik Planologi ITB.

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Bitung.

Bitung Dalam Angka 2007, Kerja Sama BPS Kota Bitung, Katalog BPS